



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DALAM PEMILIHAN PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI MELALUI KATALOG ELEKTRONIK DI
PROVINSI RIAU**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



1. **Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.**
2. **Dr. Hengki Andora, S.H, LL.M.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI MELALUI KATALOG ELEKTRONIK DI PROVINSI RIAU

Oleh: Syahrul Fahrozi, S.T. (2320119004)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan jasa konstruksi melalui katalog elektronik (e-katalog) di Provinsi Riau, mengkaji mekanisme pemilihan penyedia jasa konstruksi, serta mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, melibatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan PPK, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta penyedia jasa konstruksi, dan data sekunder dari dokumen regulasi serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi katalog elektronik di Provinsi Riau mengalami peningkatan signifikan, namun pemanfaatannya belum optimal dalam aspek kompetisi, spesifikasi teknis, dan integrasi pengawasan. Pergeseran kewenangan pemilihan penyedia dari Pokja ke PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menempatkan PPK dalam posisi tanggung jawab hukum yang lebih luas, mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana, terutama dalam mekanisme negosiasi harga. Beban tanggung jawab ini memerlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas hukum dan teknis PPK untuk pengelolaan katalog elektronik secara efektif.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jasa konstruksi, katalog elektronik, e-purchasing.



**LEGAL RESPONSIBILITY OF COMMITMENT-MAKING OFFICIALS IN
THE SELECTION OF CONSTRUCTION SERVICE PROVIDERS
THROUGH ELECTRONIC CATALOGS IN RIAU PROVINCE**

By: Syahrul Fahrozi, S.T. (2320119004)

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of construction service procurement through electronic catalog (e-catalog) in Riau Province, examine the mechanisms for selecting construction service providers, and identify and explain the forms of legal responsibility of Commitment Officials (PPK). Using a juridical empirical approach and qualitative descriptive analysis techniques, the research collected primary data through interviews with Commitment Officials, Procurement Service Units (ULP), and construction service providers, as well as secondary data from regulatory documents and relevant legal literature. The findings reveal that although the implementation of electronic catalogs in Riau Province has significantly increased, its utilization remains suboptimal in terms of competition aspects, technical specifications, and integrated supervision. The shift in authority for selecting providers from the Working Group (Pokja) to Commitment Officials, as stipulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021, places greater legal responsibilities on Commitment Officials, including administrative, civil, and criminal liabilities, particularly within the price negotiation mechanism. This increased responsibility necessitates strengthened regulations and improved legal and technical capacities for Commitment Officials to effectively manage the electronic catalog.

Keywords: legal responsibility, Commitment Official (PPK), construction services, electronic catalog, e-purchasing.

